

NASKAH PUBLIKASI

PEMBELAHAN IDEOLOGI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: MOTIF DAN IMPLIKASI SOSIAL

Oleh:

Heny Wulandari
20150520227

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A.
NIK: 19850510201204 163 130

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Titin Parwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

PEMBELAHAN IDEOLOGI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: MOTIF DAN IMPLIKASI SOSIAL

Oleh: Heny Wulandari, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Henywulandari264@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang telah dilakukan pada tahun 2017 ini merupakan momen penting untuk demokrasi di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2017 telah diikuti 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Akan tetapi dari banyaknya daerah yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkada, perhatian publik hanya tertuju pada Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi momen menarik karena banyak diwarnai dengan polemik berbau SARA, memunculkan pembelahan ideologi politik, dan intimidasi kepada warga Muslim agar tidak memilih pemimpin non-Muslim sehingga dapat memecah belahkan masyarakat Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja motif yang melatarbelakangi terjadinya pembelahan ideologi politik dan implikasi sosial pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang kemudian akan di perkuat dengan wawancara. Adapun data primer adalah KPU Jakarta, detiknews.com, kompas.com, republika.co.id, tribunnews.com, dan liputan6.com serta wawancara mahasiswa/mahasiswi Jakarta yang berada di Yogyakarta. Data Sekunder yang di peroleh berasal dari jurnal – jurnal dan buku – buku yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif penyebab konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yang diukur dengan indikator komunikasi, struktur, dan pribadi. Pertama, Indikator Komunikasi. Penyebab utama terjadinya pembelahan ideologi politik dan terjadinya konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017, karena salah satu calon gubernur DKI Jakarta (Ahok) memiliki komunikasi yang buruk saat berpidato di Kepulauan Seribu, pidatonya itu sendiri telah banyak menyakiti hati umat Muslim dan Ulama. Kedua, Indikator Struktur. FPI, MUI, dan (GNPF – MUI) melakukan aksi – aksi hingga 212 ini semata – mata hanya ingin memperjuangkan hak umat Muslim. Ketiga, pribadi. Unggahan video Buni Yani terkait Pidato Ahok Di Kepulauan Seribu membuat kebencian di masyarakat. Lalu implikasi sosial yang di ukur dengan indikator lingkungan, indikator perilaku, indikator norma, indikator teknologi dan indikator keyakinan. Pertama, Indikator lingkungan. Adanya pengaruh kampanye berbau isu agama, dan melakukan sosialisasi secara *door to door* di masyarakat. Kedua, indikator Perilaku. Adanya pengaruh perilaku dari kedua calon kandidat yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon gubernur DKI Jakarta 2017. Seperti Perilaku Ahok, yang terkesan kasar, blak – blakan dan tegas dan perilaku Anies yang lemah – lembut hingga tegas. Ketiga, norma. Dengan adanya peraturan pemerintah dan fatwa MUI membuat masyarakat semakin bingung untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta. Keempat, teknologi. Banyaknya media masa dan media *Online* yang menyebarkan hoax Isu SARA saat Pilgub DKI Jakarta. Kelima, Keyakinan. Adanya pernyataan agama yang sangat kuat saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dan dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon gubernur seagama. Jadi indikator dominan terjadinya motif penyebab konflik di Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah Indikator komunikasi dan indikator dominan dalam implikasi sosial adalah indikator keyakinan.

Kata Kunci: Pembelahan Ideologi, Pilgub DKI Jakarta 2017, Motif, Implikasi sosial

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2017 lalu telah diikuti 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Tetapi dari banyaknya daerah yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkada, perhatian publik banyak tertuju pada DKI Jakarta. Selain daerah Jakarta, ada juga daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi dengan cara pemilihan umum secara langsung yang diikuti semua masyarakat Indonesia. Pada saat itu tercatat kurang lebih ada 226 daerah, meliputi 11 provinsi dan 215 Kabupaten dan Kota (detiknews.com, 11 Agustus 2016).

Persaingan yang sangat ketat terlihat dari perolehan suara berdasarkan rekapitulasi real count dokumen C1 oleh KPU DKI Jakarta, pasangan Agus – Sylvi memperoleh 936.609 suara atau 17,06%. Selanjutnya pasangan Basuki (Ahok) – Djarot memperoleh suara sebesar 2.357.587 suara atau 42,96%. Pasangan Anies – Sandi memperoleh suara 2.200.636 atau 39,97% . Dapat dilihat dari perolehan suara dia atas yang memiliki suara terbanyak adalah pasangan Ahok – Djarot yaitu 42,96 % , diikuti pasangan calon Anies – Sandi yaitu 39, 96%, dan pasangan Agus – Sylvi yaitu 17,06% (kpuJakarta.go.id).

Saat masuk pada putaran kedua Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkenal isu SARA. Isu SARA itu sendiri muncul dalam Pilgub DKI Jakarta karena bermula dari kasus dugaan penistaan agama, surat Al – Maidah ayat 51. Peristiwa dugaan SARA atau penistaan agama ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato dihadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik (Tirto.id 16 November 2016).

Dalam Putaran Kedua Pilkada 2017, perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan Anies-Sandi yang unggul dengan perolehan suara sebesar 57,95%. Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Sementara itu, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan perolehan suara sebesar 42,05%. Pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem (kpuJakarta.go.id).

Dapat dilihat dari hasil putaran kedua pasangan Ahok -Djarot mengalami penurunan perolehan suara yang sangat merosot dan dimana perolehan suara Pilkada dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi. Merosotnya perolehan suara Ahok-djarot dikarenakan Ahok terkenal kasus SARA pada putaran kedua Pilkada. Dimana pernyataan Ahok berbunyi "*Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu,*" (BBC.com 17 November 2017).

Dengan adanya kasus tersebut maka MUI dan FPI sendiri mengeluarkan fatwanya untuk menanggapi kasus Ahok yang mana ia dikatakan telah menistakan Agama dan telah menistakan para Ulama. Menurut ketua umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar menyatakan, bahwa "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Qur'an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," (mui.or.id). Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ini pun jelas mengatakan bahwa Ahok telah menistakan agama dan para Ulama, dan yang mana Ahok juga telah melukai banyak hati umat Muslim dengan perkataannya. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menggunakan surat Al – Maidah didalamnya karena ia teringat kepada seorang ibu, yang mana ibu itu bilang kepadanya bahwa ia tidak bisa memilih dirinya karena takut dikatakan murtad (Detiknews.com, 04 April 2017).

Pada tahun 2014 MUI terlebih dahulu telah mengeluarkan fatwanya mengenai seorang pemimpin, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Syamsuddin menyatakan umat Islam wajib memilih pemimpin yang sholih. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali bahwa seorang Muslim harus memilih pemimpin Muslim (Republika.co.id, 21 Maret 2014).

Fatwa – fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI terkait kasus penistaan agama oleh Ahok dan Fatwa mengenai seorang pemimpin harus seorang yang beragama Islam ini menuai konflik panas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya konflik SARA yang meliputi agama dan etnis. Dengan adanya isu SARA seperti itu ditakutkan masyarakat akan terpecah belah dan akan saling membenci satu sama lain (Kompas.com 03 Januari 2017).

Di media sosial sendiri, isu soal pemimpin non - Muslim kembali menjadi pembahasan. Isu Sara akan tetap digunakan dalam menyerang siapa pun calon pemimpin dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut Ray, Pengamat politik dari lingkaran Madani mengatakan politik uang tidak terlalu bahaya dari pada isu SARA dalam pemilu. Karena isu SARA mengakibatkan efek jangka panjang yang akan terus menimbulkan perbedaan (Detiknews.com 26 Desember 2017).

Walau isu Sara itu akan terus ada saat pemilihan Gubernur, Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti menyebutkan “ walaupun isu Sara itu terus ada, sepertinya masyarakat akan melihat sikap pemimpin, bukan dari agama atau rasnya, yang akan dilihat nanti adalah sosok pemimpin yang dapat memimpin warga Jakarta secara keras tetapi santun”. (Merdeka.com.14 Maret 2016). Menurut wakil Kahtib Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, KH. Taufiq Damas “ Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu adalah contoh penggunaan isu SARA dalam Pilkada yang paling buruk dan paling berutil selama demokrasi paska reformasi” (Tribunnews.com 15 Oktober 2018).

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi momen menarik karena banyak diwarnai dengan kontroversi mengenai SARA dan praktek politik berbau suku, ras, dan agama. Jakarta bukan hanya Ibu kota, tetapi sudah menjadi pusat pemerintahan dimana setiap aktivitas yang ada dapat menjadi cerminan masyarakat. Menariknya juga pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memunculkan pembelahan ideologi pada politik dan ada salah satu calon Gubernur menjadi sasaran demo Jutaan orang setelah dituduh menistakan agama. Adapun intimidasi kepada warga Muslim agar tidak memilih pemimpin non-Muslim. Warga Indonesia tidak hanya berasal dari agama Islam melainkan adapun yang memiliki keyakinan yang lain. Dengan adanya SARA masyarakat non- Muslim jadi takut untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dengan adanya SARA dalam pemilihan gubernur peneliti ingin mengetahui mengenai Kebangkitan Ideologi Politik Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017; motif dan Implikasinya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja motif yang melatar belakangi terjadinya pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017?
2. Apa implikasi sosial dari pembelahan ideologi politik dalam kehidupan masyarakat DKI Jakarta?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Kemudian akan di perkuat dengan wawancara Masyarakat Jakarta (Mahasiswa – mahasiswi) yang berasal dari Jakarta yang berada di Yogyakarta. Tujuan dari wawancara itu sendiri sebagai data pendukung agar memperkuat data primer dan data sekunder yang telah diperoleh oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2009: 29) penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan digunakan untuk meneliti kondisi atau subjek yang alamiah dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan kepada maknanya daripada general. Menurut Sugiyono (2014: 53) Deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang ada dengan menggunakan cara yaitu mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah ada sebagaimana adanya tanpa merubah data asli. Penelitian ini bersifat *library Research (kepustakaan)*. Menurut Nazir (2003:27) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan studi terdahulu yaitu seperti buku –buku, literatur, media Online, dan laporan – laporan yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara

Masyarakat Jakarta (Mahasiswa – mahasiswi) yang berasal dari Jakarta yang berada di Yogyakarta dan sumber data sekunder diperoleh dari berita Online media terpercaya seperti detiknews.com, kompas.com, republik.co.id, tribunnews.com, merdeka.com, Tirto.com, BBC.com dan bps.go.id dari jurnal – jurnal, buku – buku ilmiah yang sesuai dengan peneliti.

D. HASIL PENELITIAN

Pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 disebabkan adanya motif penyebab konflik yang menimbulkan implikasi sosial di masyarakat Jakarta. Awal mula terjadinya pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dikarenakan adanya komunikasi buruk yang dilakukan oleh salah calon gubernur DKI Jakarta, lalu adanya konflik Struktur (kelompok – Kelompok organisasi) yang juga menjadi pendukung terjadinya pembelahan ideologi, dan konflik pribadi ini juga menyebabkan terjadinya konflik dan mendukung terjadinya pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan adanya konflik yang disebabkan oleh komunikasi, struktur, dan pribadi ini juga menimbulkan implikasi sosial di masyarakat Jakarta seperti, perubahan lingkungan, perilaku, norma, teknologi, dan makin kuatnya statemen agama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

A. Motif Penyebab Konflik

1. Komunikasi

Salah satu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai memiliki gaya komunikasi yang buruk ia juga dianggap telah menistakan agama. Ahok dianggap telah menistakan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu terkait surat Al-Maidah ayat 51. Saat itu Ahok berpidato dihadapan masyarakat Kepulauan Seribu, Ahok menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan menyinggung agar masyarakat jangan mau dibohongi pakai surat Al – Maidah ayat 51. Isi penggalan pidato Ahok yang menyinggung surat Al- Maidah ayat 51 :

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa,” begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang (detiknews.com, 09 Mei 2017).

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut juga menimbulkan terjadinya pembelahan ideologi politik pada tokoh – tokoh agama dan elit politik yang ada. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak pernah merasa telah menghina ayat suci Al – Quran. Ahok mengatakan video berisikan ucapannya yang menyebutkan surat Al – Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Kepulan Seribu telah disalahgunakan oleh beberapa orang. Menurut Ahok video saat ia berbicara di kepulauan seribu itu telah dipotong dan tidak ditampilkan secara utuh (Asriandi, 2016:60).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Addin Khaerunnisa Juswil sebagai warga Jakarta Timur (Mahasiswi), menyatakan bahwa:

“Bagi saya, pernyataan Ahok bukanlah sebuah penistaan agama, tetapi hanya bentuk peringatan atas apa yang sering dilakukan oleh politisi – politisi di massa kampanye” (hasil wawancara Addin Khaerunnisa Juswil, 3 Januari 2019).

Menurut penjelasan di atas Ahok bukanlah seorang penista agama yang dikatakan banyak orang. Hanya saja ada faktor politik didalamnya agar masyarakat percaya bahwa Ahok ialah seorang penista agama. Pidato yang disampaikan Ahok terkait surat Al – Maidah itu juga hanya sebagai pengingat atas politisi yang sering membawa agama ke dalam ranah politik. Dalam pidato tersebut juga Ahok tidak ada memaksa masyarakat untuk memilih dirinya hanya saja ia berbicara kalau pemimpin tidak harus Islam. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al –Maidah ayat 51 tidak ada unsur menodai atau menistakan agama, hanya saja ada permainan politik dan ada segelintir kelompok yang tidak menyukai Ahok yang membuat pembodohan agar Ahok dibenci oleh umat Islam dan agar Ahok kalah dalam

pemilihan gubernur DKI Jakarta. Masyarakat hanya diprovokasi oleh kepentingan politik dan kelompok Islam garis keras agar menjatuhkan Ahok.

Sama halnya yang telah dikatakan oleh Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ia berpendapat bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukanlah seorang penista agama seperti yang dikatakan saat ini. Apa yang Ahok sampaikan saat berpidato di Kepulauan Seribu sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang penista agama, yang mana perkataan Ahok saat itu hanya ingin mengingatkan masyarakat bahwa ia tidak memaksa masyarakat untuk memilih dirinya dengan menggunakan surat Al – Maidah ayat 51 tersebut (kbr.id. 01 November 2016).

Namun berbeda dengan pendapat dari M. Nizzar sebagai warga Jakarta Selatan (Mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya perkataan yang disampaikan oleh Ahok di kepulauan Seribu memang murni salah, karena dengan cara berkomunikasi seperti itu hanya menimbulkan perpecahan saja” (hasil wawancara M.Nizzar 03 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa Seorang pemimpin yang baik seharusnya mengerti mengenai keanekaragaman agama yang ada agar tidak ada perpecahan diantar masyarakat. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki Ahlak yang baik tidak hanya asal ucap karena perkataan itu adalah hal terpenting bagi seorang pemimpin. Dari permasalahan buruknya komunikasi yang telah dilakukan Ahok membawa dampak buruk bagi masyarakat Jakarta hingga terjadinya perpecahan di masyarakat hingga tokoh – tokoh penting lainnya.

Sama halnya yang dikatakan oleh seorang Cendekiawan Muslim Ulil Abdalla dan seorang peneliti LIPI Siti Zuhro, mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ahok adalah komunikasi terburuk yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin (Tirto.id, 18 Oktober 2016). Ketua Umum Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fornt Pembela Islam (FPI) juga mengatakan bahwa pidato Ahok saat di kepulauan Seribu memang salah dan berkonteks telah menghina Al – Quran dan dari perkataan Ahok tersebut juga telah menghina Ulama yang memiliki koneksi hukum (detiknews.com, 11 Oktober 2016).

2. Struktur

Ketua umum FPI Muhammad Rizieq Syihab, mengatakan bahwa FPI siap menjadi barisan terdepan untuk meminta kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut. Pada tanggal 14 Oktober 2016 lalu mereka menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka merasa bahwa demo yang telah digelar hari itu tidak ada respons sama sekali sehingga mereka akan menggelar aksi demo untuk kedua kalinya atau diberi nama “ *Demo Bela Islam Jilid II*” yang akan digelar pada tanggal 4 November 2016 lalu. Saat demo kedua digelar banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga memenuhi jalan protokol di pusat pemerintahan, seperti dipenuhi lautan manusia. Pada saat demo kali ini dilakukan, para pengunjung rasa menuntut agar dapat bertemu dengan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar presiden tidak menyulitkan penyelidikan kasus tersebut (merdeka.com, 30 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Maria sebagai warga Jakarta (mahasiswi), mengatakan bahwa:

“Bahwa umat Islam melakukan aksi – aksi ini hanya untuk menuntut keadilan, yang mana aksi ini dilakukan murni karena umat Islam merasa sakit hati dan kecewa atas ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. (hasil wawancara Maria 06 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas umat Islam melakukan aksi – aksi demo ini karena murni ingin membela agama Islam dari orang – orang yang menyalahgunakan agama. Didalam aksi yang dilakukan tidak ada unsur politik dan tidak ada kepentingan didalamnya. Dalam aksi ini pun tidak ada niat untuk mempengaruhi masyarakat untuk membenci calon gubernur DKI Jakarta tersebut. Aksi ini dilakukan karena memang perkataan Ahok saat itu salah dan telah melukai banyak hati umat Islam dan membuat kekecewaan di kalangan umat Muslim.

Muhammad Al Khathah sekretariat Jedral Forum Umat Islam (FUI) mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan hanyalah sebagai monumen ketakwaan umat Islam dalam

menjunjung sebuah perjuangan untuk menegakan agama dari penistaan, aksi ini pun dilakukan benar – benar murni bentuk kekecewaan umat Islam. Aksi yang digelar di Monas ini banyak menyedot perhatian dari berbagai kalangan bukan hanya umat muslim (bbc.com, 21 Februari 2017).

Namun berbeda dengan pendapat dari Feyzars Ma'ruf sebagai warga Jakarta Selatan (Mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya aksi tersebut Indonesia menjadi intoleransi Bhineka Tunggal Ika dan membuat perpecahan bahkan mindset ulama zaman sekarang sering dikriminalisasi” (wawancara Feyzars Ma'ruf, 3 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas aksi – aksi demo yang dilakukan oleh segelintir kelompok – kelompok Islam hanya membuat Indonesia krisis intoleransi beragama. Aksi – aksi yang dilakukan tersebut juga hanya membuat konflik di masyarakat seperti halnya konflik antar masyarakat, tidak hanya masyarakat konflik tersebut juga dapat membuat terpecah belahnya tokoh – tokoh agama yang ada. Aksi – aksi ini dilakukan hanya sebagai alat politik yang di selimuti silaturahmi umat Muslim. Aksi – aksi ini pun dianggap hanya menyebabkan kemacetan di jalan saja.

Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin mengatakan yang mana aksi 212 dilakukan bersifat politisi, aksi tersebut telah melenceng ke arah perpolitikan bukan lagi murni atas membela agama Islam. Dengan aksi yang telah melenceng dari arahnya ini Ma'ruf Amin tidak ingin diikuti campurkan oleh masalah yang telah menyeret Ahok. Aksi yang dilakukan saat itu juga ada kaitannya dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahok adalah seorang penista agama (detiknews.com 20 Februari 2017).

3. Pribadi

Konflik individu yang terjadi di Pilkada 2017 lalu membuat banyak kekacauan politik yang menimbulkan perpecahan ideologi di kalangan ulama dan elit politik, konflik individu tersebut ialah konflik antara dosen suwasta Buni Yani dan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Konflik itu pun membawa dampak buruk terhadap wajah Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga beredarnya isu – isu SARA dan berita – berita Hoax yang terjadi di rezim sekarang.

Kesalahan yang telah dilakukan oleh Buni Yani ini dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan diantara umat Islam. Permasalahan ini pun bermula dari pemotongan video pidato Ahok yang menyelipkan surat Al – Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu yang mana Buni Yani telah mengedit video Ahok yang awal durasinya mencapai 1 Jam lebih menjadi hanya beberapa detik saja dan ia mengunggah video tersebut ke *Facebook* pribadinya. Tak luput ia menghilangkan kata “*pakai*” dan memberi judul dengan caption “*penistaan terhadap agama*” (bbc.com, 13 Juni 2017).

Setelah Buni Yani mengunggah Video tersebut ke Facebook miliknya muncullah berbagai statement dari masyarakat. Video yang ia unggah bermuat konten SARA dan dituding menebarkan kebencian. Sama halnya yang telah dikatakan oleh kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Agus Rohmat yang mana unggahan Buni Yani terkait video pidato Ahok, ia mengatakan bahwa :

“Bukan masalah video asli atau rekayasa, dengan di unggahnya video ke akun facebooknya Buni Yani dapat menimbulkan konflik di masyarakat yang dapat dilihat pada pelaksanaan sebelum di upload oleh Buni Yani tidak ada masalah sebelumnya” (liputan6.com, 14 Desember 2016).

Dari penjelasan di atas mengatakan dari unggahan Video Buni Yani di halaman *facebooknya* yang kemudian viral tersebut dapat memicu kontroversi di berbagai kalangan. Video yang tengah viral ini juga menjadi penyebab konflik yang sangat panas di kalangan masyarakat dengan viralnya video ini akan berdampak kepada Pilkada DKI Jakarta yang tengah

di selenggarakan. Video yang telah diunggah ini akan menimbulkan rasa benci antar masyarakat.

Penyebaran video yang telah dilakukan Buni Yani ini juga telah melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat 2 Dimana Buni Yani telah menyebar luaskan video yang membuat kemarahan buplik. Video yang telah disebar oleh Buni Yani ini pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Hoax) dari berita hoax ini akan menimbulkan konflik atau kebencian disetiap kalangan masyarakat ataupun permusuhan antara masyarakat. Video pidato Ahok di kepulauan seribu ini pun telah dipotong durasinya dan ditambahkan dengan judul yang dapat membuat rasa marah masyarakat (liputan6.com, 13 Juni 2017).

Walaupun Buni Yani telah dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan berita yang berujung kebencian. Ia pun tetap bersih kukuh merasa tidak bersalah. Ia menyampaikan mubahalahnya:

"Demi Allah saya tidak pernah mengedit dan memotong video. Kalau saya bohong, biarlah Allah sekarang juga memberikan laknat dan azab kepada saya dan seterusnya kepada anak cucu saya dan saya dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka. Selama-lamanya ke dalam neraka agar saya dikutuk selama-lamanya dan anak cucu saya merasakan yang sepedih-pedihnya azab dari Allah" (detiknews.com, 30 November 2018).

Dari penjelasan di atas bahwa ia tidak merasa telah memotong video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut. Ia pun merasa dirinya tidak salah dalam kasus ini hanya saja ia telah didiskriminalisasi. Akan tetapi dari pernyataan Buni Yani tersebut ia tetap dinyatakan bersalah karena ia telah menyebarkan video pidato Ahok tersebut tanpa mengantongi izin dari pemilik video yang pertama kali mengunggahnya. Bahkan uploadan videonya ini akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, karena kesalahan yang ia lakukan ini memicu kebencian diantara masyarakat, menurut Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Agus Rohmat yang bahwa unggahannya di facebook mengakibatkan kebencian di kalangan umat Islam (liputan6.com, 14 Desember 2016).

B. Implikasi Perubahan Sosial

1. Lingkungan Masyarakat

a. Tim Sukses Ahok – Djarot

Untuk memperoleh partisipasi dari masyarakat Tim sukses pasangan Ahok – Djarot ini pun melakukan berbagai macam cara untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon kandidat mulai dari mengadakan kegiatan sosialisasi, blusukan, menggelar pengajian, dan istigosah. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses ini bertujuan untuk mengambil hati masyarakat agar mau memilih pasangan calon Ahok – Djarot. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses ini pun memfokuskan kepada warga Muslim yang ada di Jakarta dalam bentuk mengadakan kegiatan – kegiatan keagamaan (Tirto.id, 13 April 2017).

Tim sukses Ahok – Djarot ini berfokus untuk meyakini masyarakat mengenai akan keberhasilan kinerja kepemimpinan Ahok – Djarot dalam dua tahun ia menjabat. Juru bicara tim sukses Ahok – Djarot, Raja Juli Antoni mengatakan:

"kami meminta tim relawan untuk terus mengetuk pintu rumah dan pintu hati masyarakat agar mau menilai secara objektif keberhasilan (Ahok – Djarot)" (tirto.id, 13 April 2017).

Dari penjelasan di atas tim sukses kemenangan Ahok – Djarot meminta untuk semua relawan pendukung Ahok – Djarot untuk gencar melakukan kampanye kepada masyarakat agar masyarakat mau memilih pasangan Ahok – Djarot. Tim sukses Ahok – Djarot melakukan hal

ini untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memilih Ahok – Djarot dengan cara melihat dari kinerja selama ia menjadi gubernur DKI Jakarta. kegiatan ini juga di harapkan mendapatkan respons positif dari masyarakat terkait isu – isu SARA yang beredar saat ini terkait dengan pasangan calon tersebut. tim sukses dan relawan juga berharap dengan semua usaha yang telah dilakukan ini berhasil mempengaruhi masyarakat agar mau memilih pasangan calon Ahok – Djarot.

b. Tim Sukses Anies – Sandi

Untuk menarik perhatian masyarakat tim sukses Anies – Sandi ini juga menggunakan banyak strategi. Strategi mereka menggunakan cara belusukan bersama pasangan calon kandidat, dengan adanya belusukan ke masyarakat – masyarakat menengah ke bawah ini di harapkan akan mendapat simpatik dari masyarakat sekitar (kompas.com, 12 Desember 2016). Belusukan ini pun akan dilakukan oleh setiap tim sukses lainnya, karena belusukan ini telah lumrah dilakukan untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. Jadi tidak heran dengan adanya belusukan ini akan menambah perolehan suara pada Pilgub DKI Jakarta 2017 (merdeka.com, 26 November 2016).

Tim sukses pasangan calon Anies – Sandi ini melakukan kampanye via media sosial untuk memperkenalkan visi – misi dan gebrakan – gebrakan yang akan dilakukan pasangan calon kandidat untuk merubah ibu kota Jakarta. koordinator relawan Digital Anies – Sandi ini pun mengatakan:

“kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU DKI untuk tidak menggunakan alat peraga kampanye selama putaran kedua. Jadi kita memfokuskan berkampanye menggunakan media sosial dan digital untuk penajaman visi – misi dan sosialisasi program” (tirto.id, 18 Maret 2017).

Dari penjelasan di atas bahwa tim relawan Anies – Sandi menggunakan media sosial untuk berkampanye dikarenakan KPU melarang setiap calon kandidat berkampanye menggunakan alat peraga. Tim sukses Anies – Sandi ini juga memilih cara berkampanye menggunakan media masa ini juga karena dilihat masyarakat sudah banyak menggunakan media sosial jadi dengan begini media sosial lebih efektif menarik partisipasi masyarakat dalam memilih calon kandidat yang mereka usung. Ia pun mengatakan sejak mereka berkampanye melalui sosial media telah banyak relawan – relawan baru yang akan membantu untuk memenangkan pasangan Anies – Sandi.

Tim sukses Anies – Sandi ini juga tidak hanya menggunakan media sosial sebagai penarik simpatik masyarakat, mereka juga menggunakan cara *door to door* (dari pintu ke pintu). Cara yang dilakukan tim sukses ini juga dianggap lebih efektif untuk mengambil simpatik dari masyarakat, tim sukses Anies – Sandi juga akan menyuruh tim relawan untuk ikut melakukan *door to door* dan menjelaskan secara detail program kerja pasangan program – program yang akan di lakukan (kompas.com, 14 Desember 2016).

2. Perilaku

a. Perilaku Calon Kandidat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Calon kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ialah sosok yang fenomenal. Ia memiliki karisma yang terbangun dari gaya kepemimpinannya. Ia pun memiliki perilaku yang terkenal kasar, tegas, bahkan memiliki cara bicara yang blak – blakan. Walaupun demikian banyak yang menyebut perilaku Ahok persis dengan Ali Sadikin mantan gubernur DKI Jakarta ke 9 (tribunnews.com, 20 April 2018).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Indri Novitasari sebagai warga Jakarta Barat (Mahasiswi), mengatakan bahwa:

“ Perilaku Ahok yang terkesan kasar, tegas bahkan gaya bicaranya yang blak – blakan memang membuat banyak orang yang tidak menyukainya, akan tetapi dengan perilaku

yang ia miliki dapat merubah Jakarta menjadi lebih baik lagi” (wawancara Indri Novitasari, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas, meskipun Ahok memiliki perilaku ataupun gaya kepemimpinan yang terbilang kasar dan bahkan gaya bicaranya yang ceplas – ceplos akan tetapi ia memiliki jiwa yang tegas. Perilaku Ahok yang kasar memang membuat orang lain sakit hati. Akan tetapi dengan cara Ahok seperti ini akan membuat Jakarta jauh lebih baik lagi. Perilaku Ahok yang kasar serta tegas ini dapat membuat orang takut bahkan segan terhadap dirinya. Dilihat dari kinerja Ahok saat ia menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan pak Joko Widodo saat itu telah berhasil menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta bahkan hampir semua programnya telah terealisasi meskipun secara bertahap.

Sosok Ahok inilah yang telah lama di inginkan masyarakat dengan keberanian yang ia miliki mampu memberantas oknum – oknum nakal dalam pemerintahan. Masyarakat pun senang dengan kinerja Ahok yang dinilai telah berhasil membuat pelayanan di Jakarta menjadi mudah tidak bertele – tele. Sama halnya yang dikatakan oleh PNS yang bekerja di Jakarta, Basuki iya pun mengatakan bahwa sosok Ahok memang sangat tegas dan terbilang kasar, akan tetapi dengan sikap Ahok seperti itu dapat merubah kebiasaan PNS yang tidak disiplin. Mereka pun akan terus mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 (kompas.com, 04 Februari 2016).

Namun berbeda dengan pendapat dari informan Hana sebagai warga Jakarta Timur (mahasiswi), ia mengatakan bahwa:

“ sikap Ahok yang arogan dan blak – blakan dalam berbicara tidak pantas menjadi pemimpin, karena dengan gaya Ahok yang seperti itu hanya dapat membuat orang sakit hati dan dapat memicu kontroversi” (wawancara Bela, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa gaya Ahok selama ini yang terkesan kasar, blak – blakan, Arogan dan keras kepala ini tidak baik untuk menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin yang baik harus memiliki sikap yang baik dan tidak semena - mena kepada bawahan. Sikap yang dimiliki Ahok ini terkesan keras dan akan memicu kontroversi di masyarakat. Sikap ini pun tidak wajar bagi seorang pemimpin.

Sama halnya yang telah dikatakan oleh Dodi Ambardi selaku Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), yang mana dilihat dari segi positifnya, sikap Ahok yang blak – blakan ini menjadi terapan kejutan bagi kinerja birokrasi akan tetapi sikap yang seperti ini dapat dinilai negatif oleh masyarakat sehingga berlangsung ke pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 (kompas.com, 28 April 2016).

b. Perilaku Calon Kandidat Anies Baswedan

Calon kandidat gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang fenomenal dalam dunia pendidikan. Anies sendiri memiliki sikap yang tegas, lemah lembut dan ramah kepada setiap orang. Sikap tegas dan ramahnya ini banyak di sukai disetiap kalangan masyarakat. Akan tetapi sedang sikap yang lemah lembutnya ini banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa ia tidak cocok menjadi pemimpin DKI Jakarta 2017. Dari sikap yang ia miliki ini muncul pro dan kontra di masyarakat Jakarta.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Addin Khaerunnisa Juswil, sebagai warga Jakarta Timur (Mahasiswi), mengatakan bahwa:

“ Anies sendiri dikenal memiliki sikap yang ramah dan tegas terhadap orang lain. dari sikap ini ia pantas menjadi gubernur DKI Jakarta 2017, selain ini Anies adalah orang yang Sholeh” (hasil wawancara Addin Khaerunnisa Juswil, 03 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa sikap Anies yang dinilai sopan dan ramah hingga tegas ini sangat cocok menjadi pemimpin. Dengan sikap yang seperti ini akan menimbulkan reaksi positif dari masyarakat. Anies yang dikenal sebagai seorang yang sangat mengerti pendidikan

dan Sholeh ini dirasa akan dapat memajukan Jakarta dan masyarakatnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sikap ramah yang ia miliki pun membuat masyarakat senang karena mereka mudah untuk langsung berkomunikasi tanpa rasa segan.

Masyarakat pun merasa senang dengan kehadiran Anies menjadi calon kandidat gubernur DKI Jakarta karena dengan hadirnya Anies menjadi pemimpin Jakarta dapat merubah wajah ibu kota menjadi semakin baik. Masyarakat pun percaya dengan sikap lemah lembut dan sopan yang ia miliki ini masyarakat akan jauh lebih baik dan tidak ada konflik didalamnya (okezonenews.com, 11 April 2017).

3. Norma

a. Peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam undang – undang nomor 10 tahun 2016 pasal (7) ayat (1) jelas bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak wajib mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Indonesia adalah negara demokrasi yang mana setiap warganya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala hal. Indonesia pun banyak memiliki ragam suku, agama, budaya, dan ras yang mana semua berkumpul menjadi satu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat juga memiliki toleransi yang besar dalam membangun kehidupan. Dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah tidak dilihat berdasarkan agama, ras, suku, dan budaya akan tetapi yang dilihat dari kemampuannya yang ia miliki untuk dapat membangun daerah menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Bella sebagai warga Jakarta (mahasiswi), mengatakan bahwa:

“Dalam undang – undang jelas semua masyarakat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan harus saling menghargai satu sama lain” (hasil wawancara Bella, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa Peraturan yang dibuat itu pun tidak ada membedakan warganya yang ini mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan agama, suku, ras, dan budayanya. Sama halnya saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mana masing – masing calon gubernur dan wakil gubernur ini berbeda ras, suku, agama, dan budayanya. Dalam peraturan ini tidak memperlakukan semua itu hanya saja semua calon gubernur dan wakil gubernur telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi gubernur.

Di dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat oleh pemerintah ini tidak dapat lagi di ganggu gugat karena peraturan ini sudah disepakati oleh semua pihak di pemerintahan. Adanya isu SARA di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini juga tidak dapat mempengaruhi pemerintah untuk menghapus peraturan yang telah dibuatnya. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 itu pun mencuat adanya kasus larangan memilih pemimpin non-Muslim, padahal didalam undang – undang tersebut tidak ada larang non – Muslim untuk boleh menjadi seorang pemimpin.

b. Fatwa MUI

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ini banyak menuai konflik di masyarakat. Fatwa ini pun dapat memecah belahkan masyarakat yang ada di Indonesia. Fatwa MUI ini juga menuai pro dan kontra tidak hanya di masyarakat tetapi sampai ke tokoh – tokoh pening yang ada. MUI pun menegaskan bahwa mereka tidak sembarangan untuk mengeluarkan fatwa ini akan tapi mereka mengeluarkan fatwa ini karena sesuai dengan Al – Quran yang ada.

Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2014, berbunyi:

“ Seorang Muslim harus memilih pemimpin Muslim ” (kbri.id.com).

Dari penjelasan di atas bahwa Seorang Muslim wajib memilih pemimpin yang seagama yang dapat mengayomi masyarakatnya sesuai dengan kaidah – kaidah Islam. Ia pun mengatakan telah tertera didalam ayat suci Al – Quran bahwa adanya larangan tegas untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dan pemimpin yang telah mengejek agama Islam.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Feyzars Ma'ruf, sebagai warga Jakarta (mahasiswa), mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya fatwa MUI itu saya setuju, karena umat Muslim memang harus di pimpin oleh seorang pemimpin yang mengerti dengan agama dan memiliki Akhlak yang baik” (hasil wawancara Feyzars Ma'ruf 03 Januari 2019).

Berdasarkan pernyataan di atas, Larangan yang dikeluarkan oleh MUI ini sendiri jelas larangan dari Allah dan Rasulnya yang mana setiap umat Islam harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Fatwa yang dikeluarkan MUI ini juga semata mata tidak hanya larangan untuk memilih pemimpin saja, akan tetapi Fatwa MUI yang mengatakan Ahok sebagai seorang penista agama ini jugadikeluarkan setelah melewati berbagai macam diskusi oleh para Ulama.

Akan tetapi ada berbeda dengan pendapat dari informan M. Alfiansyah sebagai warga Jakarta Selatan (mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

“saya tidak setuju dengan adanya fatwa MUI ini, karena fatwa yang dikeluarkan ini berkonteks di negara Berdemokrasi dan fatwa ini hanya akan menimbulkan konflik di masyarakat”(hasil wawancara M. Alfiansyah 04 Januari 2019).

Berdasarkan pendapat di atas Tidak boleh ada batasan dalam memilih maupun mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Konteks politik pun tidak boleh di kaitkan oleh agama karena itu jauh berbeda. Fatwa yang dikeluarkan pada saat Pilkada DKI Jakarta ini pun dapat menimbulkan konflik antar masyarakat.

Sama halnya yang dikatakan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rusmadi memiliki fatwa sendiri yang memperbolehkan umat Muslim untuk memilih pemimpin non Muslim pada tahun 1999 Kompas.com (15 September 2016).

4. Teknologi

Media sosial maupun media massa saat ini sering digunakan menjadi media penyebar berita kebencian dan kebohongan. Walaupun tidak semua media sosial maupun media massa mengungkap kebencian akan tetapi di balik itu semua ada kepentingan untuk satu tujuan. Efek yang di berikan dari berita atau informasi yang tidak sesuai dengan faktanya dapat membuat terpecah belahnya masyarakat Indonesia yang telah termakan rayuan dari berita Hoax tersebut. Dengan adanya berita hoax itu pun dapat membuat panas kondisi perpolitikan (Kompas.com. 11 Januari 2017).

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang telah diselenggarakan banyak berita – berita hoax menyebar kebencian untuk masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berita – berita hoax ini pun tidak hanya tersebar di akun Facebook akan tetapi berita penyebar kebencian ini telah menyebar ke setiap media masa dan media sosial dengan kedok untuk menurunkan elektabilitas masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. . Sama halnya yang telah dikatakan oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, mengatakan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat mengubah pilihannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini karena adanya informasi di media sosial. Pengaruh media sosial ini pun cukup tinggi yaitu sebesar 21, 39 % (Kompas.com. 01 Februari 2017).

Kecanggihan teknologi saat ini juga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon Gubernur dan wakil gubernurnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya dengan kecanggihan teknologi ini seperti media masa dan media sosial ini dapat dijadikan senjata menyebarkan kebencian dan berita – berita hoax untuk dapat mengambil perhatian masyarakat Jakarta. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 banyak diwarnai dengan munculnya berita – berita yang berisikan kebohongan dan kebencian. Berita – berita tersebut dapat membawa pengaruh buruk terhadap pemikiran masyarakat terkait Pilkada yang diselenggarakan. Berita – berita hoax di media sosial ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan pertarungan argumen di masyarakat.

5. Keyakinan

Pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki kekuatan pengaruh agama yang kuat untuk dapat melobi partisipasi masyarakatnya. Dapat diketahui memang masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya Islam akan tetapi dengan adanya politik berbau agama ini dapat menghilangkan toleransi antar masyarakat. Bahkan media terus – terusan menyebarkan berita mengenai agama yang dapat meracuni pikiran masyarakat. Pilkada DKI Jakarta ini juga ramai di bicarakan karena di dalamnya juga ada fatwa untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dari MUI (republika.co.id, 21 Maret 2014).

Masyarakat menjadi resah bukan hanya karena ada larangan dari MUI saja akan tetapi mereka resah juga karena maraknya spanduk yang tertulis larangan mensholat jenazah yang memiliki perbedaan terhadap pandangan politik. Direktur Moderat Muslim Society, Agus Muhammad, mengatakan kecenderungan untuk menggunakan setatement agama dalam berpolitik Pilkada itu sangat tidak baik bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Setatement agama ini pun akan memiliki dampak yang cukup besar di kehidupan masyarakat tidak hanya saling bermusuhan akan tetapi akan terpecah belah menjadi kubu –kubu (Beritasatu.com. 14 Maret 2017).

Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu pertama kalinya di perpolitikan yang mengangkat isu SARA didalamnya. Pengaruh keyakinan ini begitu besar dalam menarik partisipasi masyarakat, karena agama dijadikan alat untuk memilih pasangan calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pengaruh keyakinan ini pun menjadikan masyarakat resah dan bimbang untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Al Azhar Ahmad Muhammad Ath – Thayeb ini juga mengatakan jangan mempolitisasi agama dalam politik. yang mana agama dan politik ini tidak akan menyatukan masyarakat, bahkan isu SARA yang ada pada Pilkada DKI Jakarta ini pun dapat menghilangkan rasa toleransi antar masyarakat yang ada (liputan6.com, 04 Mei 2018).

pengaruh keyakinan ini sangat dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Pasalnya pengaruh keyakinan tersebut telah melibatkan agama didalamnya, yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Didalam keyakinan ini pun terdapat keterlibatan Fatwa MUI yang terkait yang terkait larangan untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama semakin membuat masyarakat resah dan bingung. Bahkan masyarakat juga resah dengan banyaknya spanduk yang tersebar tertulis larangan menyolati jenazah yang memiliki perbedaan pandangan politik. pengaruh keyakinan ini juga membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan menjadi saling benci terhadap umat yang lainnya.

E. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Munculnya motif terjadinya pembelahan ideologi saat Pilkada DKI Jakarta ini pun dikarenakan adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang calon gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masalah yang ia timbulkan itu membuat MUI mengeluarkan Fatwanya dan menjadi konflik di masyarakat. Masalah itu juga menimbulkan implikasi sosial di masyarakat Jakarta dan berpengaruh kepada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

motif penyebab terjadinya konflik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini ialah indikator komunikasi, indikator komunikasi ini lebih dominan dari pada indikator struktur dan indikator pribadi, karena indikator komunikasi ini yang menyebabkan awal terjadinya pembelahan ideologi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu indikator struktur dan indikator pribadi juga sebagai pendukung terjadinya konflik. Lalu implikasi sosialnya yang paling dominan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ialah indikator keyakinan, indikator keyakinan ini lebih dominan dari pada indikator lingkungan, indikator perilaku, indikator norma, indikator teknologi. Karena didalam indikator ini terdapat Statement yang melibatkan agama yang sangat kuat dan dapat menggerakkan masyarakat untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta seagama.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran, permasalahan – permasalahan yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu baik didalamnya mengandung SARA, politik identitas, bahkan terjadi pembelahan ideologi politik dan konflik yang dapat memecah belahkan masyarakat selesai di tahun politik 2017 saja. Untuk Pilkada selanjutnya semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di tahun politik selanjutnya.

1. Semoga kedepannya para Calon Kandidat lebih selektif lagi dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata – kata yang lebih baik, yang tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat.
2. Semoga Masyarakat tidak lagi mudah diprovokasi oleh media dan tidak mudah dipengaruhi oleh berita – berita hoax yang tidak kredibel.
3. Terhadap pemerintah untuk kedepannya semoga pemerintah lebih mengayomi masyarakat dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi berita – berita hox yang dapat memecah belahkan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asriandi. (2016). *Kontruksi pemberitaan pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta (analisis framing Detik.com dan Kompas.com edisi 1 – 31 Agustus 2016)*. Skripsi. Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin.
- BBC.com. (17 November 2016). Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>.
- BBC.com. (13 Juni 2016). Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353>
- Detikews.com.(11 Agustus 2016). *Data Pilgub DKI dari masa ke masa, diusung banyak parpol belum tentu menang*, <https://news.detik.com/berita/3273110/data-pilgub-dki-dari-masa-ke-masa-diusung-banyak-parpol-belum-tentu-menang>.
- Detiknews.com. (2017). *Agus-Sylvi gelar kampanye akbar #SATUkanJakarta, SBY hadir*. <https://news.detik.com/berita/d-3419822/agus-sylvi-gelar-kampanye-akbar-satukanjakarta-sby-hadir>.
- Detiknews.com.(2017). *Jurus Ahok-Djarot Vs Anies-Sandi kampanye di medsos*. <https://news.detik.com/berita/d-3455602/jurus-ahok-djarot-vs-anies-sandi-kampanye-di-medsos>.
- Detiknews.com. (2017). *Ahok jelaskan kenapa singgung Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu*. <https://news.detik.com/berita/d-3465139/ahok-jelaskan-kenapa-singgung-al-maidah-51-di-kepulauan-seribu>.
- kompas.com. (2017). *Isu SARA di arena politik 2017 akankah terulang di 2018 ?*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/08342321/isu-sara-di-arenapolitik-2017-akankah-terulang-di-2018>.
- Kompas.com. (2017). *Lingkaran setan situs “ Hoax” dan media sosial*. <https://tekno.kompas.com/read/2017/01/11/07450077/lingkaran.setan.situs.hoax.dan.media.sosial>.
- Kompas.com. (2017). *Sandiaga targetkan OK OCE Capai 8.000 peserta di putaran kedua*.
- kompas.com. (2017). *Isu SARA di arena politik 2017 akankah terulang di 2018 ?*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/08342321/isu-sara-di-arenapolitik-2017-akankah-terulang-di-2018>.
- Kompas.com.(2016). *Ahok bantah menghina Kitab Suci*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/10225241/ahok.bantah.menhina.kitab.suci>.
- Kompas.com. (2016). *Artis ramai – ramai dukung Ahok – Djarot, berpengaruh?*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/20/07290891/artis.ramai-ramai.dukung.ahok-djarot.berpengaruh>.

- Kompas.com. (2016). *Berbagai strategi tim pemenangan Anies – Sadi pada PilkadaDKI2017*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/20455361/berbagai.strategi.tim.pemenangan.anies-sandi.pada.Pilkada.dki.2017>.
- Kurniasih,N. (2016). Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dalam Meme: Sebuah Analisa Isi Terhadap Meme-meme di Dunia Maya.*Jurnal Komunikasi*.
- Liputan6.com. (2016). *Politisi: Buni Yani penyebab konflik di masyarakat*.
<https://www.liputan6.com/news/read/2678129/polisi-buni-yani-penyebab-konflik-di-masyarakat>.
- liputan6.com. (2018). *Nasdem: politisasi masjid rusak kesakralan agama*.
<https://www.liputan6.com/news/read/3500743/nasdem-politisasi-masjid-rusak-kesakralan-agama>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Addin Khaerunisa Juswil (03 Januari 2019). Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- M. Nizzar (03 Januari 2019). Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Feyzars Ma'ruf (03 Januari 2019). Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Maria Theresa (06 Januari 2019). Mahasiswi Universitas Respati Yogyakarta.
- Hana Dwika (06 Januari 2019). Mahasiswi Universitas Respati Yogyakarta.
- Indri Novitasari (04 Januari 2019). Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bela Anastasya P (04 Januari 2019) Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- M.Alfiansyah (04 Januari 2019). Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

